

# WEBINAR



Optimisme menghadapi kebiasaan Baru Di masa pandemi Covid-19 dalam aspek Kesehatan dan ekonomi terutama *Branding Digital*.

Purwadi, Dosen FEB UNMUL

Sabtu, 7 Agustus 2021

PPKM ANTARA  
HARAPAN DAN  
KENYATAAN— PERSPEKTIF  
PENGELOLAAN APBN



# PANDEMI COVID 19- SEMAKIN MEMBUKTIKAN PEMERINTAH TIDAK PRO RAKYAT (Harusnya Lockdown ( berdasarkan UU karantina)

Beranda > Nasional >

Berita Covid-19

## Rizal Ramli Sebut Pemerintah Pelit ke Rakyat Tapi Loyal ke Oligarki

Redaksi - Nasional

29 Juli 2021



Rizal Ramli

**Menit.co.id** – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan bahwa The

• DANA YANG  
DIBUTUHKAN JIKA  
LOCKDOWN” 3 BULAN :  
HANYA MEMBUTUHKAN  
DANA Rp. 415 Trilyun  
(untuk memberi makan rakyat  
miskin 70 juta x Rp.1,5 juta x 3  
bulan dan biaya obat obatan  
sekitar Rp. 100 Trilyun. )

# PEMERINTAH PILIH – PSBB DAN PPKM

**Biaya Lockdown Rp 18,7 Triliun per Hari, Jokowi Pilih PPKM Mikro: 'Esensinya Sama untuk Membatasi Kegiatan Masyarakat'**

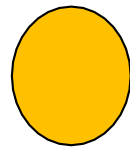
Nikita Yulia Ferdiaz Kamis, 24 Juni 2021 | 12:15 WIB



Jokowi memilih penerapan PPKM mikro dibanding lockdown yang memakan biaya hingga triliunan rupiah ✕

- **PSBB ATAU PPKM** : kegiatan masyarakat dibatasi tapi kebutuhan pokok dan biaya Kesehatan tidak dijamin
- Bentuk kedzoliman yang luar biasa.

FAKTANYA  
SANGAT  
IRONISNYA



# Paradox Pembiayaan Kesehatan dalam APBN 2020

*Pembiayaan kesehatan sangat kecil dibandingkan alokasi untuk bidang yang lain, padahal UU No.2 tahun 2020 syarat dengan kesehatan jiwa manusia*

(triliun Rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2019			2020				
			APBN	s.d. Mei	% thd APBN	APBN	Perpres 54/2020	s.d. Mei	% thd APBN	% thd Perpres 54/2020
1	012	KEMENHAN	108,36	27,10	25,01	131,18	122,45	25,73	19,62	21,02
2	033	KEMEN PU PERA	110,73	56,92	51,40	120,22	95,68	20,06	16,69	20,97
3	060	POLRI	86,19	19,32	22,41	104,70	96,12	10,71	10,23	11,15
4	027	KEMENSOS	58,91	0,29	0,49	62,77	60,69	0,54	0,86	0,89
5	025	KEMENAG	62,07	1,56	2,51	65,06	62,41	1,37	2,10	2,19
6	015	KEMENKEU	45,16	1,99	4,41	43,51	40,93	1,40	3,23	3,43
7	022	KEMENHUB	41,55	17,41	41,89	43,11	36,98	10,89	25,26	29,44
8	024	KEMENKES	58,75	2,72	4,63	57,40	76,55	1,66	2,89	2,17
9	018	KEMENTAN	21,69	3,09	14,26	21,06	17,44	1,63	7,72	9,32
10	013	KEMENKUMHAM	13,31	3,18	23,92	13,85	13,41	1,74	12,54	12,95
<b>10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar</b>			<b>606,70</b>	<b>133,57</b>	<b>22,02</b>	<b>662,85</b>	<b>622,66</b>	<b>75,73</b>	<b>11,43</b>	<b>12,16</b>
<b>KL Lainnya</b>			240,73	26,25	10,90	246,77	213,87	11,32	4,59	5,30
<b>Total KL</b>			<b>847,44</b>	<b>159,81</b>	<b>18,86</b>	<b>909,62</b>	<b>836,54</b>	<b>87,06</b>	<b>9,57</b>	<b>10,41</b>

Data bersumber dari Run SPAN  
2019: per tanggal 12 Juni 2019  
2020: per tanggal 7 Juni 2020

Sumber : APBN KITA 16 Juni 2020, Kementerian Keuangan (2020)

# ANGGARAN DANA PENANGANAN COVID19 & PEN

3 Bulan, 3x Naik  
(Achsanul Qosasih  
– Anggota BPK III)

Rp  
405.1 T

Rp  
695.2 T

Rp  
905.1 T

DARI PERPPU NO. 1/2020

UU NO. ~~2~~2020

DEFISIT APBN 2020 :  
Rp 1.039 T ( 6.34% PDB)



[Rp 85.0...](#) [Rp 1.85...](#) [Rp 94.8...](#) [BELI SEKARANG](#)



Baca artikel lebih nyaman dan mudah melalui aplikasi Kompas.com

[DAPATKAN](#)

[Home](#) > [Money](#) > [Whats New](#)

# BPK: Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp 1.035,25 Triliun

Selasa, 29 Desember 2020 | 21:11 WIB



[Komentar](#)

[Lihat Foto](#)





# ALOKASI DANA COVID-19 : Rp 695.2 T

NO	ALOKASI	DANA
1	Sektor Kesehatan	Rp 87,5 triliun
2	Perlindungan Sosial	Rp 203,9 triliun
3	Insentif Usaha	Rp 120,61 triliun
4	UMKM	Rp 123,46 triliun
5	Pembiayaan Korporasi	Rp 53,57 triliun
6	kementerian/lembaga serta pemerintah daerah	Rp 106,11 triliun

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619172653-532-515291/sri-mulyani-sebut-dana-penanganan-corona-naik-jadi-rp905-t>

# Rincian Alokasi Dana Covid 19 di sektor kesehatan

NO	AdLOKASI SEKTOR KESEHATAN	DANA
1	Insentif & santunan Nakes	Rp 1.9 triliun
2	Pencegahan & Pengendalian Covid19	Rp 6.4 triliun
3	Pelayanan Laboratorium	Rp 33.5 Miliar
4	Layanan Kesehatan :	
A	Klaim Rawat	Rp 22 triliun
B	Kefarmasian & Alkes	Rp 196 miliar
C	Kelola limbah medis & diseminasi informasi	Rp 91.7 miliar

# PANDEMI COVID 19 JADI ALASAN UNTUK MENUTUPI KERUSAKAN KEBIJAKAN EKONOMI

Stimulus  
Covid-19 dari  
Hutang LN

Bansos Salah  
Sasaran

Insentif Pajak  
tidak efektif

Gelombang  
PHK

'PUNGLI'  
Rapid Test

# PROBLEM BANTUAN SOSIAL STIMULUS COVID-19

Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Tahap Pertama:

1. Bentuk Bansos Covid-19 berupa:
  - a. Bantuan Langsung Tunai
  - b. Bantuan Sembako
  - c. Subsidi Listrik
  - d. Insentif kartu pra-kerja
  - e. Program keluarga harapan
  - f. Program indonesia pintar.
  
2. Terdapat 1.004 aduan, 81.37% atau 817 diantaranya terkait masalah penyaluran bansos :
  - a. Penyaluran tidak merata dalam hal waktu, sasaran (masyarakat penerima & wilayah distribusi)
  - b. Masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar;
  - c. Terdaftar tapi tidak menerima Bansos
  - d. Tidak dapat menerima Bansos karena KTP Pendetang

Sumber : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) / Rabu 10-06-2020

# HUTANG MENGGUNUNG

- Perpres No.54/2020 tentang Perubahan Postur & APBN tahun 2020 ⑦ kelonggaran menambah hutang lebih dari 3% terhadap PDB;
- Posisi akhir hutang tahun 2019 : Rp 4.778 T;
- Outlook 2020, potensi pembiayaan dari hutang menembus Rp 6.000 T;
- Potensi hutang meningkat hingga Rp 1.222 T di tahun 2020 akibat stimulus Covid-19 & hutang jatuh tempo tahun ini Rp 426.6 T
- Sumber pembiayaan :
  1. Surat Berharga Negara Rp 1.485,6 T
  2. Penarikan pinjaman Rp 148 T

Sumber : [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)

Utang Jumbo Pemerintah Buntut Stimulus Pandemi Corona

# 'PUNGLI' RAPID TEST

- Anggaran penanganan Covid-19 terus bertambah, Rapid Test masih terus bayar
- Seandainya semua rakyat Indonesia di-rapid test, dana yang keluar tidak sampai Rp 40 T (KH.Cholil Nafis – MUI & NU)
- Simulasi Dana Rapid Test :  
Rp 135.000 x 280 juta penduduk = Rp 37.8 T

# RAKYAT DI PAJAKI

*Buah Hingga Sayuran*

## DAFTAR SEMBAKO YANG BAKAL KENA PAJAK

Pemerintah berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembako. Mulai dari beras, buah-buahan hingga sayuran.

Untuk PPN multi tarif akan dikenakan sebesar 5% untuk barang kebutuhan pokok

Tarif 25% untuk barang super mewah

Opsi PPN final ini dimungkinkan untuk dijadikan skema bagi pengenaan barang kena pajak yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti sembako.

Staf Khusus Menteri Keuangan YUSTINUS PRASTOWO

Yustinus menjelaskan bahwa tarif terendah di multi tarif ini tidak dikenakan untuk semua kebutuhan pokok.

Ia mencontohkan untuk beras premium atau mewah akan dikenakan tarif normal 12% dan sedangkan beras murah seperti produk Bulog dapat dibanderol PPN Final 1%

Beras, Ubi-ubian, Gula Konsumsi, mineral bumi, Minyak dan Gas Bumi, Jagung, Daging, Telur, Bumbu, Batu Bara, Emas, Sayur-sayuran, Gabah, Susu, Garansi, Kedelai, Bumbu, Batu Bara, Emas

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara. Serta menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

WWW.CNBCINDONESIA.COM

SUMBER: CNBC INDONESIA/ILUSTRASI & INFOGRAFIS: EDWARD RICARDO

Home > Kehamilan > Trimester 3

TRIMESTER 3

14 June 2021

## Biaya Melahirkan Kena Pajak, Dana Persalinan di RS Swasta Bisa Membengkak!

Bagaimana tanggapan Moms tentang kebijakan ini?



# PARA KAPITALIS DIBERI INSENTIF PAJAK

KANAL **LIPUTAN 6** 

**HEADLINE HARI INI** Dihantui Pungli dan Korupsi, Pengawasannya

Home > Bisnis > Ekonomi

## Beri Insentif Pajak Sektor Otomotif dan Properti, Pemerintah Siapkan Rp 8 Triliun

Oleh **Liputan6.com** pada 01 Mar 2021, 17:20 WIB 



Suasana Bursa Mobil Bekas Blok M. Jakarta, Jumat (2/10/2020). Selain itu Mobil baru diwacanakan mendapat insentif pembebasan pajak hingga 0 persen, kebijakan tersebut dikhawatirkan mengganggu kelangsungan bisnis pedagang mobil bekas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

 **APBI-ICMA**  
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA  
INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION



## OMNIBUS LAW BEBASKAN ROYALTY BATU BARA, APBI: POSITIF UNTUK HILIRISASI

 15 Oktober 2020 - 09:40 WIB

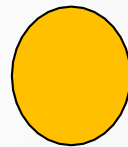
# iNews.id

## FINANCE

Sumber :  
<https://www.inews.id/finance/bisnis/omnibus-law-bebaskan-royalti-batu-bara-apbi-positif-untuk-hilirisasi>



**BAGAIMANA  
HASILNYA**



# JUMLAH UTANG PEMERINTAH



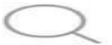
Ingin Membaca Berita Tanpa Iklan?  
Buka di aplikasi Liputan6

BUKA



KANAL

LIPUTAN6



SPECIAL CONTENT

Home > Bisnis > Ekonomi

## Utang Pemerintah Tembus Rp 6.527,29 Triliun per April 2021

Oleh [Liputan6.com](#) pada 28 Mei 2021, 10:10 WIB



Utang Pemerintah ([Liputan6.com/Triyasni](#))

# UTANG PEMERINTAH KE BUMN

D katadata.co.id  
Infografik

## 9 BUMN TAGIH PEMERINTAH LUNASI UTANG

### UTANG PEMERINTAH KE BUMN

Pemerintah diminta melunasi utang kepada sembilan BUMN. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat keuangan perusahaan yang terimbas pandemi Covid-19.



RP **96,53** TRILIUN

Subsidi Solar & kompensasi selisih harga jual Premium (2017-2019)



RP **2,6** TRILIUN

Bantuan bencana alam (2018-2019), CSHP gula (2019), KPSH beras (kuartal IV-2019 & kuartal I-2020)



RP **48** TRILIUN

Kompensasi (2018-2019) & subsidi diskon tarif listrik (2020)



RP **1,14** TRILIUN

Pelayanan di BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit pemerintah, TNI, Polri



RP **17,1** TRILIUN

Pengadaan pupuk subsidi dari 5 anak perusahaan



RP **257,87** MILIAR

Kurang bayar kewajiban pelayanan publik (2015, 2016, 2019)



RP **5,02** TRILIUN

Pembebasan lahan (2016-2020)



RP **59,9** MILIAR

Pembebasan lahan untuk jalan tol Serang-Panimbang



RP **3,71** TRILIUN

Pembebasan lahan untuk jalan tol

Keterangan:  
CSHP:  
Cadangan Stabilitas Harga Pangan  
KPSH:  
Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga

SUMBER: KATADATA, TIRTO  
PENULIS: ANDREA, LIDWINA  
DESAIN: DANI NURBIANTORO

# DATA DATA KEUANGAN BUMN - KERUGIAN

TAHUN 2017 -- 5,23 T

TAHUN 2018--- 22 T

## 23 BUMN MERUGI



## 13 BUMN Yang MERUGI TAHUN 2018



# DATA DATA KEUANGAN BUMN - KERUGIAN

**SEMESTER I -2020-----68,3 T**

NO.	BUMN	JUMLAH
1	Jiwa Sraya	37,4
2	PERTAMINA	9,56
3	GARUDA INDONESIA	10,34
4	ASABRI	8,49
5	KAI	1,35
6	ANGKASA PURA	1,16

# DATA DATA KEUANGAN BUMN - UTANG

LUKA INDONESIAIAKU



## Hutang BUMN Membengkak 10 BUMN pemilik hutang terbesar, antara lain :

1	 BANK BRI	1.008 T	6	 Bank  <b>BTN</b>	249 T
2	 mandiri	997 T	7	 TASPEN	222 T
3	 BNI	660 T	8	 WASKITA	102 T
4	 PLN	543 T	9	 Telkom Indonesia	99 T
5	 PERTAMINA	522 T	10	 PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY	76 T

# KONDISI PERUSAHAAN SWASTA

Home > News > Berita

## Giant PHK Massal, 7.000 Karyawan Kena PHK

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

NEWS - 28 May 2021 17:17



**Jakarta, CNBC Indonesia -**  
Perusahaan ritel PT Hero Supermarket Tbk bakal menutup seluruh gerai Giant mulai Juli 2021. Kehilangan itu bakal



Warta Ekonomi .co.id

News / Nasional

## Pandemi Bikin 29 Juta Penduduk Usia Kerja Di-PHK

Rabu, 10 Februari 2021, 22:32 WIB



Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

# KONDISI PERUSAHAAN SWASTA

KANAL

LIPUTAN 6



HEADLINE HARI INI 20, Atlet Indonesia Bisa Jaga Tradisi Emas?

Home > Bisnis

## PPKM Darurat Diperpanjang 6 Pekan, Mal akan PHK 84 Ribu Pegawai dan Rugi Rp 5 Triliun

Oleh **Maulandy Rizky Bayu Kencana** pada 14 Jul 2021, 09:00 WIB



Pengunjung turun menggunakan eskalator di Lippo





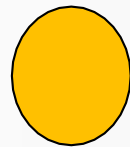
# Warga Miskin Bertambah 2,76 Juta, Pemerintah Prediksi Bisa Naik 4 Juta Tanpa PEN

**Bisnis.com**

18 Feb 2021, 16:55 WIB - Oleh: **Jaffry Prabu Prakoso**



**KENAPA  
PEMERINTAH  
DZALIM DAN  
EKONOMI  
AMBYAR**



# FAKTA PENGELOLAAN APBN DI INDONESIA

- PARADIGMA PENGELOLAAN APBN DAN SDA “ PARADIGMA KAPITALIS ( BISNIS)...>

**NEOLIBERALISME /  
NEOIMPERIALISME**

- PENGELOLAAN PENUH KORUPSI DAN KOLUSI

?



**Risma Sebut Pemerintah Tak Bisa Terus Bantu Rakyat, Yan Harahap: Rakyat Juga Punya Keterbatasan**

Muhammad Ibrahim

26 Juli 2021, 20:39 WIB



Kontari.co.id



**Novel Baswedan sebut nilai korupsi Bansos capai Rp 100 triliun, ini respons KSP**

Oleh: Lidya Yuniartha

Jumat, 21 Mei 2021, 20:22 WIB



**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Kantor Staf Presiden mengatakan pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial (bansos) senilai Rp100 triliun cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi.

**Sekian dan Terimakasih**